



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990

Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991

Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007

Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-52907304-6
Fax: 021-5261136
e-mail : fhchozie@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Nomor : 20.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas).
-Pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan **MADYANTORO PURBO**, lahir di Bandung, pada tanggal 04-03-1958
(empat Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan) , Presiden Direktur
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut dibawah ini, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mawar Indah
Nomor 11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak ----
Bulus, Kecamatan Cilandak;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174060403580006, yang berlaku hingga tanggal -----
04-03-2018 (empat Maret dua ribu delapan belas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dan selaku
kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK** -----
WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, yang Berita Acara Rapatnya
dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 19 tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei
dua ribu lima belas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK WOORI SAUDARA**
INDONESIA 1906 Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota



Bandung, Gedung Bank Woori Saudara, Jalan Diponegoro Nomor 28, Bandung 40115, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-08-1975 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 69 Tambahan Nomor : 448/1975, dan seluruh anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 42 tanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-00128.40.40.2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-00130.40.41.2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas).-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 42 tanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Nomor: AHU-A00130.40.42.2014 tanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu empat belas). -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk** ----- dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ---
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ---
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu -
lima belas), bertempat di di Gedung The Energy Lantai 28 Kawasan Pusat
Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan., telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita Acara -----
Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 19 tanggal 12-05-2015 (dua---
belas Mei dua ribu empat belas). -----

B. Bahwa Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai rencana
Rapat sesuai dengan surat tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua
ribu lima belas) Nomor: 086/BWSI-DIR/OJK/III/2015.-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran -----
Dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" dan ---
"Tribun Jabar" masing-masing pada tanggal 02-04-2015 (dua April dua ribu
lima belas); dan -----
-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3.c Anggaran Dasar -----
Perseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" dan "Tribun Jabar"---
masing-masing pada tanggal 20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima ----
belas) yang berbunyi sebagai berikut :-----

BANK-----

WOORI SAUDARA

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Bandung dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung The Energy Lantai 28

Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53

Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan untuk Tahun Buku 2015. -----

4. Penetapan Gaji / honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota -----

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 serta ---

tantiem Tahun Buku 2014 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan ---

Komisaris. -----

Mata Acara RUPS Luar Biasa: -----

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan

dengan ketentuan: -----

i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang ---

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka; dan -----

(ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.-----

Dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan -----

agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini --

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan -----

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UU PT"). Dengan telah efektifnya

penggabungan usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan

pada tanggal 30 Desember 2014, maka dalam mata acara ke-1 -----

termasuk didalamnya mengenai persetujuan Laporan Keuangan -----

PT Bank Woori Indonesia yang telah menjadi satu kesatuan dengan

Laporan Keuangan Perseroan dengan demikian memberikan pelunasan

dan pelepasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) bagi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Woori Indonesia atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2014 hingga pada saat efektifnya Penggabungan Usaha PT Bank Woori Indonesia ke dalam Perseroan. Hal ini sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha dan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk nomor 30 tanggal 7 November 2014, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.-----

- b. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ke-1, Perseroan berencana -----
meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar -----
Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar -----
Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). -----
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU PT,
peningkatan modal dasar tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- c. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ke-2, yaitu Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, selain perubahan pasal mengenai Modal Perseroan
sebagaimana akan diputuskan dalam mata acara RUPS Luar Biasa ke-
1, Anggaran Dasar Perseroan akan dilakukan penyesuaian antara lain
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32
/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33"). ----

Catatan : -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.-----
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang ---- berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia pada tanggal 17 April 2015, pukul 16.00 WIB.-----
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan ----- Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham ----- Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro --- Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan. PT Sinartama Gunita----- Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telepon (62-21) 392 2332 (Hunting) Faksimili (62-21) 392 3003.-----
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat ---- diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri ---- yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum ----- memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan --- Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat -----

("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. -----

5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk ----- membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir. -----

6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat ----- Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang--- saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

-----Bandung, 20 April 2015-----

-----**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK**-----

-----**Direksi**-----

-bahwa selebar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman dan--- Panggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, Nomor: 18. -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --- 17-04-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua--- juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham. -----

E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh - PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam -----

Rapat telah hadir dan/atau diwakili 4.960.238.570 (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau lebih kurang sejumlah 97,79 % (sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor : 19 tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) untuk menyatakan keputusan Rapat .

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat terdapat pemungutan suara sebagai berikut :

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 139.639.538 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham atau sebesar lebih kurang 2,82 % (dua koma delapan dua persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 4.820.599.032 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh dua) saham atau sebesar lebih kurang 97,18% (sembilan puluh tujuh koma satu delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 30 POJK Nomor 32 dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran

Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian Rapat, memutuskan :

- I.1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut dan menyatakan dalam suatu akta notariil tersendiri dihadapan notaris, termasuk memohon persetujuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas.

- II.1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. -----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan yang Berita Acara Rapat . -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan ini bernama **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"). -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 30-06-1975 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit ;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan

1. dalam perdagangan surat-surat dimaksud.-----
2. Surat Pengakuan Hutang dan Kertas Dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
3. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);-----
5. Obligasi;-----
6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
7. Instrumen Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;-----
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;-----
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;-----
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;-----
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;-----
- l. Melakukan kegiatan usaha uang elektronik;-----

- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain-----
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----
- n. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi-----
ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;-----
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,-----
perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan -----
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh -----
OJK;-----
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi----
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan dengan syarat----
harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan---
yang ditetapkan oleh OJK;-----
- q. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang
berlaku;-----
- r. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan
atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli-----
tersebut wajib dicairkan secepatnya;-----
- s. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang-----
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- t. Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa sesuai dengan-----
ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;-----
- u. Melakukan kegiatan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan yang-----

ditetapkan oleh OJK dan lembaga lain yang berwenang.-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2,-----
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya-----
peraturan di bidang perbankan.-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar-----
5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah-----
ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar -----
Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :-----
 - a. sejumlah Rp231.637.300.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) merupakan setoran

lama sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 15 tanggal -----
25 November 2010 yang dibuat dihadapan Kirana Ivymnerva -----
Wilamarta, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung, yang-
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ----
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-32072 tanggal 15-12-2010 (lima
belas Desember dua ribu sepuluh) ; juncto dalam akta Nomor: 66 --
tanggal 28-01-2014 (dua puluh delapan Januari dua ribu empat -----
belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-08988
tanggal 06-03-2014 (enam Maret dua ribu empat belas); -----
b. sejumlah Rp 275.598.366.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar lima
ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu
Rupiah) merupakan hasil dari Penggabungan Perseroan dengan ----
PT Bank Woori Indonesia. -----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam
bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi-----
ketentuan sebagai berikut: -----
a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang-----
Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "RUPS")
mengenai penyetoran tersebut; -----

- b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga. -
- c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar ini. -----
- d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan----- dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----
- e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba----- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ----- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar semua hal yang material. -----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ----- ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dan pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----- (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan ----- saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar----- dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang----- ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah----- terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama----- pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. -----

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

- 1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
- 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan----- persetujuan RUPS; -----
- 3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi----- yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- 4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak— Memesan Efek Terlebih Dahulu atau perubahannya/penggantinya. ----

d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua----- pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek-----

Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan-----
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat-----
Ekuitas. -----

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil
bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d
ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas
tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak-----
sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang-
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi-----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui-----
pengeluaran Efek tersebut. -----

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya-----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang-----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban-----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya. -----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -----
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya. -----

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan

disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya; -----

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)----- bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia atau penggantinya atas ----- penambahan modal dasar. -----

b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi----- sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali----- Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam----- jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk----- mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.-----

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang-----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%-----
(dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak--
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,-----
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus-----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama,-----
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang (orang perseorangan) atau 1 (satu)
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham atau lebih. -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.-----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa--
orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara-----
tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa
mereka bersama dan hanya nama wakil atau kuasa ini saja yang-----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil atau kuasa ini----
harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan
dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 belum dilaksanakan, maka para-----

- Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam-----
RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil / kuasa bersama---itu, maka Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang-----namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.----
 7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam-----RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin-----dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang-----Pasar Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----
 9. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif-----pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan-----wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau-----surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif-----Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib-----menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga-----Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan-----dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.-----
 10. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan-----

peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut-----
dicatatkan. -----

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
4. Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus-----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;-----
 - b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
 - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.-----
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau surat saham

pecahan nilai nominal, obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek—
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi
nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat—
tanda tangan dari Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau—
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tanda tangan tersebut
dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang
dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan—
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.—

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian

- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham-----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi-----
Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan---
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
 4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat ----
Ekuitas.-----

PENITIPAN KOLEKTIF -----

Pasal 8 -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-
hal sebagai berikut: -----
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian. -----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank-----

- Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian-----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -----
tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a
di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di-----
atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang-----
Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau-----
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau-----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang-----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang-----

- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat-----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan-----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau-----
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai-----
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau
musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan-----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita-----
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana; -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan-----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan-----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;-----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada----- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang----- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi----- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak

lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham----- bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah----- Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan----- Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;---
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para----- pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau----- diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam-----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamatnya dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat-----
meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan-----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau-----
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 6 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan----- khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar----- Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima----- pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen----- pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke----- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan----- ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai

pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan-----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan-----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan ----- dicatatkan. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**Pasal 11**-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.-----
 2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
 3. RUPS lainnya dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----- kepentingan Perseroan. -----
 4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
 5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
 6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 ----- Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai ----- saldo laba yang positif; -----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----
- Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, -- RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
7. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ---- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ---
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan ----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

8. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:** -----

- (1). melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS) oleh -----
1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan -----
RUPS. -----
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat ----
disertai alasannya. -----
- (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1) ayat ini harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;---
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
anggaran dasar Perseroan.-----
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham ----
dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS ----
kepada Dewan Komisaris.-----
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan -----
Komisaris. -----
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ---
dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan:-----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini
dan butir (6) ayat ini . -----
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini ----
paling kurang melalui: -----
i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional; -----
ii. situs web Bursa Efek; dan -----

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

(10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9).butir iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. --

(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini , pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:

- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal. -----
- b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. -----
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ----- ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -----

----- WAKTU PENYELENGGARAAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana ----
dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14) Anggaran Dasar. -----

6. Pengumuman RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini

paling kurang memuat:-----

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata
acara rapat; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9 Anggaran Dasar, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat ----- informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.-----

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
bahasa Inggris. -----

(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana

dimaksud pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2) Anggaran Dasar.

7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14) Anggaran Dasar.

8. **Usulan Mata Acara Rapat:**

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS.-----
- (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat
dalam pemanggilan. -----

9. Pemanggilan RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
paling kurang memuat informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --
tersebut; dan -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat-----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----

- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---- berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ----- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ---- digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ----- pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada ----- pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini , informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----
- (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ----
- (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, ----- Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris --- menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14) Anggaran Dasar. -----

11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----
- (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----
- (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
- (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

13. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. -----
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -----

butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ---- ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini ,----- penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----

(4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -----

(5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. -----

(6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.---

(7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, ---- sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan: -----

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat

- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini. -----
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. -----
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(6), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . -----

15. Hak Pemegang Saham: -----

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----

- (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 12.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat -----
pemanggilan RUPS. -----
- (6). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain
yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

---PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

----- Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir
(1) ayat ini dan butir (2) ayat ini , RUPS dipimpin oleh pemegang

- saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

2. Tata Tertib RUPS: -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----- kepada pemegang saham yang hadir.-----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -- butir (1) Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat;-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; -----
dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

----- **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN,** -----

----- **KOURUM KEPUTUSAN DALAM** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN** -----

----- **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, -----
keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak ----- memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan ----- mengikuti ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara

perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara

mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan

suara yang berbeda. -----

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini -----

dikecualikan bagi: -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. -----

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS: -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----

4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.-----

5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: _____

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. _____

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini

wajib memuat informasi paling kurang: _____

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; _____

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; _____

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; _____

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; _____

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; _____

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; _____

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan _____ pemungutan suara; _____

h. keputusan RUPS; dan _____

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan _____ pembagian dividen tunai. _____

- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran ----- nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang ----- menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----- pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling ----- lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk: -----

- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14) Anggaran Dasar. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;-----
 - sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, satu di antaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur dengan memperhatikan peraturan----- yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----
menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana-----

yang merugikan keuangan negara dan/atau yang-----
berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak-----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan---
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
dan -----

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang-----
dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal
ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam
surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----

6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan -----

- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----
 9. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.-----
 10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
 11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan
anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan -----
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
 12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
 13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---
dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --

lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya --

sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender --
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b -----
ayat ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan -----
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ---
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----

14.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -
waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan -----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus -----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ---
puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. -----

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----

- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----
huruf c ; atau -----
 - b. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. ----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----
- k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja-----
mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini
atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai -----

dengan lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf e ayat ini.-----

15. RUPS dapat: -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan -----
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ----
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -
ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----

anggota Direksi tersebut: -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
atau -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal. -----
19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden
Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam
Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan ----
rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik -----
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
penghasilan yang sah. -----
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan
serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan

- Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan --- RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
 3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.-----
 5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
 6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang --- berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
 7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ----- dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -- Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. -----

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ----- Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka); --

b. mengikat Perseroan sebagai penanggung /penjamin dalam rangka -- melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, antara lain -----

memberikan Bank Garansi dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; -----

c. melakukan pembelian alat-alat keperluan Perseroan; -----

d. meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang dari pihak lain, dalam hal: -----

1) menerima pinjaman uang dari bank atau Lembaga-----
keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk -----
Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur oleh --
Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya yang -----
berwenang, baik dalam bentuk bilateral maupun sindikasi;
atau -----

2) melakukan transaksi valuta asing dan derivatif yang-----
berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan bank, baik
di dalam maupun di luar negeri; -----

dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh
Rapat Dewan Komisaris. -----

e. mengikat Perseroan sebagai penanggung/ penjamin (borgtocht); -----

f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau -----

melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk -----
bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah; -----

g. menggadaikan atau membebankan barang-barang kekayaan -----
Perseroan; -----

h. melepaskan hak-hak atas benda bergerak tidak berwujud, seperti hak
paten dan/atau merek; -----

- i. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjaminkan saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain; -----
- j. melakukan hapus buku atau tagihan milik Perseroan dan/atau ----- melakukan hapus tagih sepanjang hal tersebut tidak termasuk dalam -- ketentuan ayat 11 di bawah ini; -----
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau ----- (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta ----- Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ----- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ---- dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi ----- pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu - 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat -- dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini. -----
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi- dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud -- dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal. -----
- 13.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; -----

- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. -----
- c. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur sebagaimana butir a dan b Ayat ini tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.-----
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----- Rapat Direksi. -----
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut -- di atas. -----
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-- dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ---- benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ---- Perseroan.-----

18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu --- oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang -- 1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,--- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau ---- diwakili dalam Rapat. -----

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --- dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, --- bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --- mewakili Direksi. -----

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana ---- apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota -- Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, --- dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal ----- Rapat. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau----- di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat

di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. -----

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. -----

Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil
Presiden Direktur, Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden -----
Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat -
Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----

13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir . -----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa -- - semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang----- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan---- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi.-----

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi,
dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan
telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat
secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang
berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang -----
diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan harus diangkat -----
Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri -----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----

selama menjabat: -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; -----
dan -----

- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -
5. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 dan ayat 4 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ----- berlaku. -----
6. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-----
7. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
9. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksudkan dalam pasal ini, tunduk pada peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan/atau ayat 5 pasal ini. -----
11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.-----
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----- Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
13. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung -----

sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----

14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat----- diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris ----- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ---- dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan ---- sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan ---- tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya ---- yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ----- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----

a. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas ----- pemberhentian tersebut.-----

b. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal -
lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

- 16.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----

membebaskannya.-----

17. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir,

apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

atau -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,

dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----

18. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ---

ditetapkan oleh RUPS. -----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -

mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga)

orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus

diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari

kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan

tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Pasar Modal. -----

20. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya -

belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah -----

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ---

Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan -----

mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----

Presiden Komisaris. -----

21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi

baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan

selain penghasilan yang sah. -----

22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.-----

23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung----- jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya ----- pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha --- Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan ----- RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya ----- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ----- anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.-----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----

- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang --- berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, ----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ----- kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ----- apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan--- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua---

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan—
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala—
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

10. Dewan Komisaris mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.-----
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi ----- tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib ----- untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -- Dewan Komisaris. -----
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila --- karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota - Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ----- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas--- dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu ---- seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----- apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya, dan

dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

15. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis dari Direksi. -----
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota -----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara-----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya
tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5,
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----

sebelum rapat diselenggarakan. -----

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para -- anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ---- sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat --- dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari -- kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu ----- dan tempat Rapat. -----
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -- di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam - wilayah Republik Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila -----

Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh - dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. ----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ---- Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.-----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris -- lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ---- apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak -- yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -- harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan ----- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ----- mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---- tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat - menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan --
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan

- datang. _____
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan _____ Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. _____
 6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal _____ pemanggilan RUPS Tahunan. _____
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku _____ Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. _____
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan _____ tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan _____ Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan _____ tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah _____ menyetujui isi laporan tahunan. _____
 9. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan secara berkala sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. _____

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan

tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku-----
Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak-----
menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan-----
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan-----
pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau-----
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
9. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat

Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini. -----

10. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
11. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini. -----
12. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan----- mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.-----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat----- memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan untuk keperluan----- Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus dengan memperhatikan UUPT -- dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS ----- dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ----- Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan----- tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya dengan ---- memperhatikan ketentuan dalam UUPT.-----

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan-----
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

DAN PEMISAHAN -----

Pasal 25 -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14
ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,-----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.-----

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----

STATUS BADAN HUKUM -----

Pasal 26 -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3)-
Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya
status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----

TEMPAT TINGGAL -----

Pasal 27 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap ---
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 28 -----

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ----- Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya. -----

Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sejumlah 5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut: ---

- a. Woori Bank, Korea, sejumlah 3.754.701.359 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp375.470.135.900,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). -----
- b. Arifin Panigoro, sejumlah 631.785.585 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.178.558.500,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).--

- c. PT Medco Intidynamika, sejumlah 307.282.403 (tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.728.240.300,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus Rupiah). -----
- d. Masyarakat, sejumlah 378.587.313 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp37.858.731.300,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Rupiah). -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa ----- dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan -- persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, mendaftarkan dalam Wajib---- Daftar Perusahaan kepada instansi yang berwenang lainnya sehubungan----- dengan Perubahan Anggaran Dasar ini Perseroan tersebut di atas, untuk----- keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----- disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, adalah yang ---- sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia atau penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh
dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya,
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan
bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah -----
dan membebaskan saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa -----
apapun juga. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya; -----

-Para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal --
07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) , bertempat ---
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga---
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo; dan ---

- Tuan HONENG MARSIDI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 --
(sembilan belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam) -----
bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara; --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa-----
penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"



